

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Pada 28 Juni 2018, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) merilis laporan panel tentang tantangan keijakan *plain packaging* Australia. Panel berpihak pada Australia, menolak klaim yang diajukan oleh Kuba, Republik Dominika, Honduras, dan Indonesia. Hasil analisa, beberapa temuan dan tema utama yang dapat diambil dari laporan pada tahap analisis dalam penelitian meliputi *plain packaging* adalah tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang sangat parah di Australia. Pada temuan panel *plain packaging* tidaklah membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah untuk yaitu melindungi kesehatan masyarakat, dan karena itu tidak melanggar Perjanjian WTO dalam TBT Agreement *Plain packaging* juga tidak melanggar perlindungan kekayaan intelektual yang berdasarkan Perjanjian WTO dalam *TRIPs Agreement*.

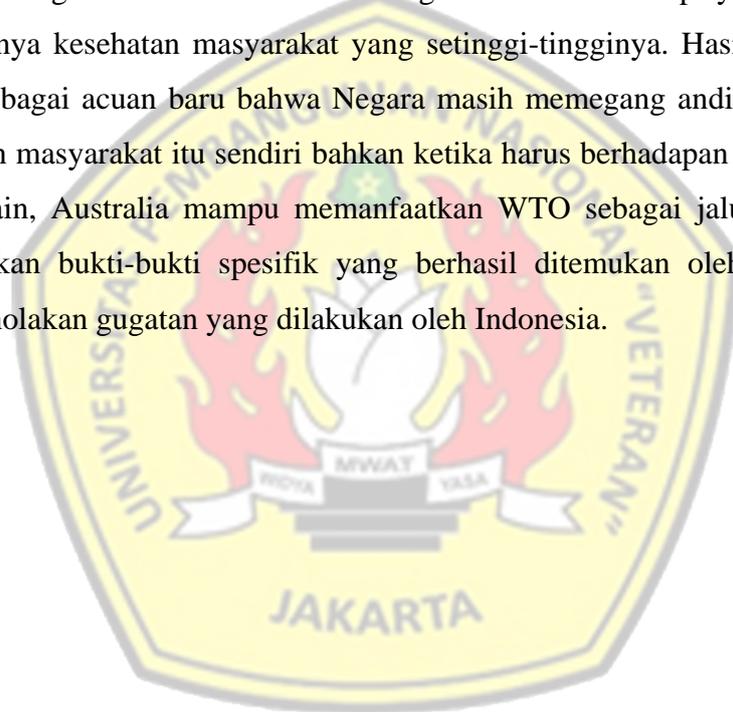
Temuan faktual panel Panel membuat sejumlah temuan faktual tentang tujuan dan sifat kebijakan *plain packaging*, dan implementasinya di Australia tujuan dari undang-undang kemasan biasa Australia adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi penggunaan, dan paparan terhadap, produk-produk tembakau, konsekuensi dari tidak mencapai tujuan ini akan menjadi 'sangat luar biasa' mengingat konsekuensi kesehatan yang serius dari penggunaan tembakau dan paparan asap tembakau sebagai konsekuensi kesehatan yang harus segera diperbaiki. Tindakan *plain Packaging*, dalam kombinasi dengan langkah-langkah pengendalian tembakau lainnyamemang cocok, dan memang, berkontribusi pada tujuan Australia untuk mengurangi penggunaan, dan paparan produk tembakau.

V.2 Saran

Dalam kesimpulan ini sesuai dengan hipotesa penulis bahwa kesehatan menjadi garis besar keputusan WTO dalam penolakan gugatan Panel menegaskan bahwa kepentingan yang lebih vital dan penting adalah melindungi manusia

terhadap masalah kesehatan. Penulis menilai dan menyarankan kepada Pemerintah bahwa apa yang telah ditemukan oleh panel sebagai dasar hukum dari penolakan gugatan Indonesia menjadi pelajaran yang mencambuk Indonesia dimana Negara memiliki peran penting dan bertanggungjawab terhadap hak atas kesehatan. Pertanggung jawaban Negara yang sebenarnya harus dipenuhi terhadap hak kesehatan masyarakat adalah Negara bertanggung jawab untuk menghormati hak atas kesehatan, melindungi hak atas kesehatan serta memenuhi hak atas kesehatan tersebut.¹

Pemenuhan hak atas kesehatan yang dilakukan Australia menjadi cerminan bagi Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup yang sehat agar terwujudnya kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hasil putusan dapat dinilai sebagai acuan baru bahwa Negara masih memegang andil besar terhadap kesehatan masyarakat itu sendiri bahkan ketika harus berhadapan dengan Negara-negara lain, Australia mampu memanfaatkan WTO sebagai jalur sengketa dan memberikan bukti-bukti spesifik yang berhasil ditemukan oleh panel sebagai dasar penolakan gugatan yang dilakukan oleh Indonesia.



¹ Wahyu Pratama, Negara Wajib Bertanggungjawab Terhadap Hak Atas Kesehatan Masyarakat, lbhbandaaceh.org, <http://lbhbandaaceh.org/negara-wajib-bertanggungjawab-terhadap-hak-atas-kesehatan-masyarakat/>, diakses pada 24 Juni 2019